

**EFEKTIVITAS PEMANFAATAN DANA
KEISTIMEWAAN DALAM URUSAN KEBUDAYAAN DI
KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2014 - 2015**

(Studi Kasus Kelompok Kesenian Tari Angguk)

Disusun oleh :

AKMAL SOFFAL HUMMAM

2013.052.0078

**JURUSAN ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA**

2016

ABSTRAK

Dana Keistimewaan yang diperoleh Daerah Istimewa Yogyakarta adalah dana diberikan pemerintah pusat sebagai konsekuensi atas disahkannya Undang-Undang No 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Alokasi Dana pada tahun 2014 dan 2015 paling banyak dimanfaatkan untuk urusan kebudayaan. Kabupaten Kulon Progo adalah kabupaten yang paling banyak mendapat alokasi Dana Keistimewaan urusan kebudayaan pada dua tahun tersebut. Kulon Progo memiliki kesenian iconic yaitu Tari Angguk yang bahkan sudah diakui kementerian sebagai bentuk kebudayaan tak benda dari Kulon Progo.

Pada penelitian kali ini penulis menggunakan metode kualitatif dengan melakukan wawancara ke berbagai narasumber terkait dan studi dokumentasi. Narasumber pada penelitian ini adalah Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kulon Progo dan perwakilan dari masyarakat pegiat kesenian tari angguk. Wawancara tersebut dilakukan guna mencari tahu tingkat keefektifitasan Danais urusan kebudayaan terhadap kesenian tari angguk.

Guna mengetahui keefektifitasan dari Danais urusan kebudayaan terhadap kesenian tari angguk peneliti menggunakan teori dari JP. Champbell yaitu mengukur tingkat keefektifitasan menggunakan 5 indikator : 1. Keberhasilan program, 2. Keberhasilan sasaran, 3. Tingkat kepuasan, 4. Tingkat input dan output, 5. Capaian program keseluruhan. Dari penelitian dapat diungkapkan bahwa dana keistimewaan berhasil untuk menjalankan program yaitu desa budaya dan lomba senam angguk. Danais juga efektif guna mencapai keberhasilan sasaran yaitu melestarikan kebudayaan tari angguk dan mempromosikan kesenian tari angguk sampai tingkat nasional melalui program yang telah berhasil dilaksanakan. Kepuasan pada program juga menunjukkan tingkat keefektifitasan dana keistimewaan, pemerintah puas karena apa yang telah menjadi sasaran dari program telah tercapai dan untuk masyarakat pegiat kesenian angguk juga puas karena sejak adanya dana keistimewaan mereka jadi lebih sering pentas. Input dari Danais adalah asupan dana bagi Disbudparpora untuk menjalankan programnya sedangkan outputnya program tersebut telah mencapai sasaran yang diinginkan dan masyarakat pegiat seni angguk telah merasakan perubahan yang lebih baik. Capaian dari program keseluruhan menunjukkan Danais telah sukses membawa perubahan yang lebih baik untuk melestarikan tari angguk dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pegiatnya. Meskipun sudah efektif namun penggunaan Dana Keistimewaan masih kurang optimal terhadap kesenian tari angguk karena lebih besar untuk pembangunan fisik.

Kesimpulannya adalah Dana Keistimewaan tahun 2014 dan 2015 telah efektif digunakan Disbudparpora Kulon Progo untuk melestarikan dan mempromosikan kesenian tari angguk. Saran terhadap pemanfaatan selanjutnya adalah porsi untuk kebudayaan tak benda lebih ditingkatkan agar seimbang dengan dana yang diperuntukkan pembangunan fisik dan Disbudpora lebih mendengarkan aspirasi dari masyarakat pegiat kesenian angguk agar program kedepan lebih baik.

Kata Kunci : Efektivitas, Dana Keistimewaan, Kebudayaan

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Yogyakarta adalah salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki hak keistimewaan. Hak keistimewaan tersebut diperoleh berdasarkan historis Yogyakarta sehingga masuk dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yogyakarta dulunya adalah wilayah kerajaan Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten Pakualaman yang bergabung dan masuk ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dan pada 17 Agustus 1945 Yogyakarta memberi sumbangsih yang besar dalam mempertahankan, mengisi dan menjaga keutuhan NKRI (UU No 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta). Daerah Istimewa Yogyakarta telah mendapat pengakuan sejak masa penjajahan dari dunia internasional, baik pada masa kependudukan Belanda hingga kependudukan Jepang. Bahkan Daerah Istimewa Yogyakarta bisa saja menjadi sebuah negara merdeka setelah Jepang meninggalkan Indonesia karena Daerah Istimewa Yogyakarta pada saat itu telah mempunyai sistem pemerintahan, wilayah dan juga penduduk sendiri (Endriatmo, 2009 : 86).

Daerah Istimewa Yogyakarta selalu dipimpin oleh seorang raja dengan gelar Sultan yang sekaligus menjabat sebagai gubernur. Gelar SULTAN tersebut sangat erat dengan sejarah terciptanya keistimewaan bagi Yogyakarta. Setiap raja yang bertahta selalu bergelar SULTAN, diambil dari bahasa Arab yang dahulu dikenal sebagai Negara Ngerum, SULTHON. Gelar Sultan memberi makna bahwa raja Ngayogyakarta Hadiningrat bukan hanya menekankan aspek ke-Tuhanan saja tetapi menekankan pula aspek keduniaan dengan menyeimbangkan aspek *Habluminallah* dengan *Habluminannas* (Huda, 2013 : 133-134). Aspek tersebut yang membuat warga Daerah Istimewa Yogyakarta ingin mempertahankan gelar keistimewaan, salah satunya dengan dipimpin langsung oleh Sultan-nya. Pembangunan yang terjadi di Indonesia hakekatnya adalah ingin membangun manusianya. Dalam membangun manusia tersebut tidak lepas dari unsur agama dan budaya (nasional.kompas.com pada 20 Januari 2016).

Mulai tahun 2007 Daerah Istimewa Yogyakarta mengajukan RUU untuk mengatur sekaligus melindungi hak keistimewaannya. Baru pada tahun 2012 RUU tersebut disahkan menjadi UU No 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal terpenting dalam UU No 13 Tahun 2012 ada 5 hal pokok meliputi :

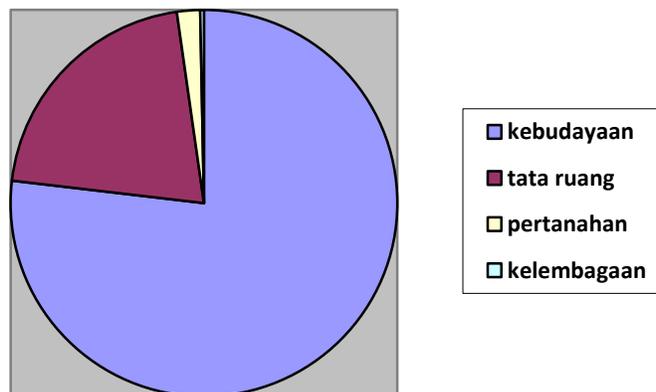
- a. Tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur,
- b. Kelembagaan Pemerintah Daerah DIY,
- c. Kebudayaan,

- d. Pertanahan,
- e. Tata ruang.

Hal yang paling menonjol dari Yogyakarta sehingga disahkannya UU Keistimewaan adalah dari sektor budaya yang tidak terlepas dari histori Kerajaan Mataram Islam. Daerah Istimewa Yogyakarta menyimpan banyak potensi kebudayaan. Namun seiring berjalannya waktu kebudayaan tersebut mulai lekang tergerus jaman. Dengan adanya Dana Keistimewaan untuk sektor kebudayaan diharapkan dapat melestarikan kebudayaan sehingga image “Jogja Kota Budaya” tidak hilang dan hanya menjadi kenangan.

Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disebut Danais adalah dana yang berasal dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara yang dialokasikan untuk mendanai Kewenangan Istimewa dan merupakan Belanja Transfer pada bagian Transfer Lainnya. Danais merupakan bentuk pengakuan Negara atas desentralisasi asimetris yang dimiliki Yogyakarta karena keistimewaannya.

Urusan kebudayaan adalah sektor yang paling menarik untuk diamati karena sektor tersebut mendapat alokasi Danais pada tahun 2014 dan 2015 yang paling banyak. Dari total perolehan Danais tahun 2014 yakni 523 M urusan kebudayaan mendapat porsi 375,1 M (dikutip dari Anugraheni dalam tribunjogja.com pada 16 Januari 2014). Sedangkan tahun 2015 sebesar Rp 547,5 M, alokasi untuk urusan kebudayaan sebesar Rp 420,8 M, urusan tata ruang Rp 114,4 M, urusan pertanahan Rp 10,6 M, dan urusan kelembagaan Pemda DIY Rp 1,7 M (dikutip dari Hasanudin dalam harianjogja.com 10 Maret 2015).

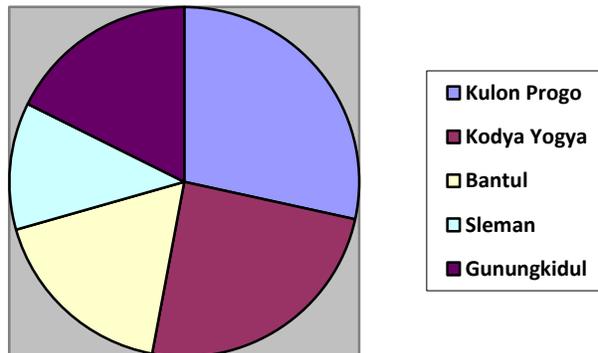


Gambar 1.1

Alokasi dana keistimewaan tahun 2015

Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki empat kabupaten dan satu kota madya. Salah satu dari empat kabupaten tersebut adalah Kulon Progo. Kulon Progo adalah kabupaten di barat Yogyakarta. Kabupaten Kulon Progo dengan ibu kota Wates memiliki luas wilayah 58.627,512 ha (586,28 km²), terdiri dari 12 kecamatan 87 desa, 1 kelurahan dan 917 dukuh. Dengan jumlah penduduk pada sensus tahun 2010 sejumlah 388.869 jiwa (kulonprogokab.go.id).

Kabupaten Kulon Progo termasuk Kabupaten dengan jumlah kemiskinan terbanyak di Yogyakarta bedampingan dengan Kabupaten Gunungkidul. Indeks Kemiskinan Masyarakat (IKM) tahun 2005 menyebutkan angka 25,11 persen untuk kabupaten Kulon Progo (Endriatmo, 2009 : 239). Selain memiliki prosentase IKM yang tinggi, Kulon Progo juga merupakan daerah dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terendah yaitu rata-rata 20 M tiap tahunnya (Endriatmo, 2009 : 241). Namun untuk pendistribusian Dana Keistimewaan urusan Kebudayaan tahun 2014 dan 2015, Kabupaten Kulon Progo mendapat porsi tertinggi yaitu tahun 2014 sebesar 29 M dan 2015 sebesar Rp 33 M, sedangkan Kota Yogyakarta Rp 25 M, Kabupten Gunungkidul Rp 18 M, Kabupaten Sleman Rp 12 M dan Kabupaten Bantul Rp 18 M (dikutip dari Mukhijab dalam pikiran-rakyat.com pada 11 Januari 2015).



Gambar 1.2
Perolehan Dana Keistimewaan Urusan Kebudayaan Tiap Kabupaten

Tari angguk adalah tarian tradisional “icon” dari Kabupaten Kulon Progo. Tarian angguk muncul sejak jaman Belanda berkuasa. Tarian ini diciptakan untuk menunjukkan rasa syukur kepada Tuhan setelah panen padi. Tari angguk menggunakan busana yang mirip dengan busana serdadu Belanda pada jaman penjajahan. Dengan melihat data diatas diharapkan terjadi perubahan terutama pada keberlangsungan budaya seni tari angguk di Kabupaten Kulon Progo dan kesejahteraan pegiat seni didalamnya. Perubahan tersebut tidak akan terjadi bila pemerintah Kabupaten Kulon Progo campur tangan dengan membuat kebijakan yang pro dengan kesejahteraan khususnya pegiat kesenian tari angguk.

Penggunaan Dana Keistimewaan yang tepat secara efektif dan efisien diharapkan dapat menjadi solusi mengenai permasalahan budaya yang semakin pudar ini. Sudah seharusnya keistimewaan ini dapat dinikmati oleh warga Yogyakarta. Cita – cita keistimewaan Yogyakarta tentunya tidak ditujukan untuk meromantisir masa lalu. Karena konstuksi keistimewaan akan benar-benar dapat dirasakan masyarakat sebagai penerima dan tujuan keistimewaan, jika sesuai dengan prinsip “Tahta Untuk Rakyat” maka “Keistimewaan Juga Harus Untuk Rakyat” (Endriatmo, 2009 : 249).

Disahkannya UU Keistimewaan tersebut juga diiringi desentralisasi fiskal berupa Dana Keistimewaan guna menyokong 5 hal pokok keistimewaan. Desentralisasi fiskal mencakup pemberian wewenang lebih besar sesuai dengan potensi dan kebutuhan daerah (Sjafrizal, 2014 : 109). Maka, berdasarkan uraian diatas penulis sangat tertarik untuk mengulas lebih dalam tentang penggunaan Dana Keistimewaan terutama pada urusan kebudayaan sehingga terdorong untuk menulis “**Efektivitas Pemanfaatan Dana Keistimewaan Dalam Urusan Kebudayaan di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2014-2015 (Studi Kasus Kelompok Kesenian Tari Angguk)**”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana efektivitas Dana Keistimewaan urusan kebudayaan terhadap kelompok tari angguk di Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2014-2015?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui seperti apakah keefektifitasan peranan dan penggunaan Dana Keistimewaan urusan kebudayaan terhadap kelompok tari angguk di Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2014-2015.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis, untuk memperkaya kajian ilmu pengetahuan khususnya pada bidang Ilmu Pemerintahan yang terkait dengan efektivitas penggunaan Dana Keistimewaan khususnya di bidang kebudayaan seni tari angguk.
2. Secara Praktis, dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan maupun masukan bagi pemerintah daerah dalam menetapkan kebijakan-kebijakan dalam upaya menjaga keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta dan khususnya pemerintah kabupaten Kulon Progo dalam penggunaan Dana Keistimewaan urusan kebudayaan kedepannya.

E. Landasan Teori

Pada penelitian ini saya menggunakan 4 Teori Dasar, yaitu :

- 1) Efektivitas
- 2) Desentralisasi Asimetris
- 3) Dana Keistimewaan
- 4) Kebudayaan.

Teori Operasional menggunakan teori Efektivitas milik JP. Cambell yaitu mengukur efektivitas menggunakan 5 indikator :

- 1) Keberhasilan Program
- 2) Keberhasilan Sasaran
- 3) Kepuasan Terhadap Progra
- 4) Tingkat Input dan Output
- 5) Pencapaian Tujuan Menyeluruh

Metode Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas pada penelitian ini menggunakan metode studi kasus. Metode studi kasus adalah uraian penjelasan komprehensif mengenai berbagai aspek seorang individu, suatu kelompok, suatu organisasi, suatu program, atau situasi sosial (Sutrisno, 2002 : 112). Kasus pada penelitian ini adalah Efektivitas Pemanfaatan Dana Keistimewaan Pada Urusan Kebudayaan di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2014 - 2015. Kemudian analisis dilakukan melalui pendekatan penelitian kualitatif dengan model penelitian deskriptif.

PEMBAHASAN

1. Keberhasilan program

Keberhasilan program merupakan tingkat keberhasilan terhadap rencana program yang disusun oleh Disbudparpora Kabupaten Kulon Progo. Disbudparpora sebagai pengguna anggaran Dana Keistimewaan berhak menentukan dan menyusun sendiri program apa saja yang berhak menggunakan Dana Keistimewaan terutama pada kesenian tari angguk pada tahun 2014 dan 2015. Program tersebut bertujuan untuk mempopulerkan kesenian tari angguk dan melestarikan kesenian angguk.

| No | Program Dinas Budparpora | Realisasi Program | Anggaran | Keberhasilan Program |
|----|----------------------------|-------------------|--|----------------------|
| 1 | Desa Budaya | 2014 – sekarang | <ul style="list-style-type: none"> • 2014 Rp 50 juta Per Kecamatan • 2015 Rp 19 juta Per Kecamatan | Cukup Berhasil |
| 2 | Promosi Angguk melalui FKY | 2014 | Rp 647.000.000,00 | Cukup Berhasil |
| 3 | Senam Angguk | 2014 – 2015 | <ul style="list-style-type: none"> • 2014 Rp 20 juta | Cukup Berhasil |

| | | | | |
|---|-------------|------|-------------------|------------------|
| | | | • 2015 Rp 26 juta | |
| 4 | 1000 Angguk | 2017 | - | Belum Terlaksana |

Secara umum program yang dicanangkan pemerintah melalui Dinas Kebudayaan dikatakan cukup efektif. Program yang disusun pemerintah seperti melestarikan kesenian tari angguk dan mempromosikan tari angguk hingga tingkat nasional cukup berhasil. Namun program tersebut kurang sesuai dengan harapan masyarakat pegiat seni tari angguk pada umumnya karena tidak melibatkan mereka dalam penyusunan program. Sehingga harapan masyarakat pegiat seni tari angguk kurang terwujud yaitu bantuan untuk perlengkapan semisal kostum, gamelan, dan *soundsystem* masih kurang diperhatikan pemerintah. Permasalahan yang tidak kalah penting yaitu pembinaan bibit muda seniman angguk juga masih kurang diperhatikan.

2. Keberhasilan sasaran

Keberhasilan sasaran adalah lanjutan dari keberhasilan program. Keberhasilan sasaran lebih melihat dari faktor target dari penggunaan Danais pada kesenian tari angguk telah mencapai sasaran yang ditentukan. Sasaran penggunaan Danais pada kesenian tari angguk menurut Joko Mursito adalah membina generasi muda agar tetap melestarikan tari angguk dan mempopulerkan kesenian angguk hingga kancah nasional. Guna mencapai sasaran pertama yaitu pembinaan generasi muda agar tetap melestarikan budaya kesenian tari angguk melalui program pembinaan desa budaya dan senam angguk. Meskipun pada desa budaya tersebut tidak spesifik hanya kesenian angguk saja, namun tergantung potensi kesenian unggulan dari masing-masing desa tersebut.

Keberhasilan sasaran berikutnya dapat dilihat dari eksistensi kesenian angguk. Sejak adanya dana keistimewaan kelompok kesenian tari angguk jadi lebih sering pentas. Bukan hanya pentas dalam kegiatan desa budaya namun juga pentas untuk mewakili kabupaten bahkan mewakili provinsi ke tingkat nasional. Danais dapat digunakan untuk melakukan persiapan pentas meskipun belum sepenuhnya menutup biaya untuk pentas dari grup angguk tersebut. Dengan sering pentasnya grup angguk tersebut secara tidak langsung dapat meningkatkan kesejahteraan dari pegiat kesenian angguk. Jika dilihat dari keberhasilan sasaran dana keistimewaan untuk meningkatkan popularitas angguk dapat dikatakan sudah cukup efektif.

3. Kepuasan terhadap program

Kepuasan terhadap program merupakan hasil penilaian dari berjalannya program yang telah direncanakan sebelumnya. Program yang telah direncanakan pemerintah Kulon Progo melalui Disbudparpora adalah membuat desa budaya, menggelar FKY

dengan menampilkan 100 penari angguk, membuat lomba senam angguk. Sejauh ini baru program itu saja yang sudah berjalan

Untuk program pertama yaitu melestarikan kesenian angguk menggunakan Danais adalah dengan cara membuat kantong budaya pada setiap desa budaya. Pemanfaatan dana keistimewaan dengan cara membuat desa budaya cukup efektif karena dengan adanya desa budaya kelompok angguk jadi lebih sering pentas. Dana keistimewaan yang dialokasikan untuk kesenian memang hanya sedikit namun sudah memberi perubahan terhadap kelompok angguk jadi dengan cara seperti ini cukup efektif untuk melestarikan kesenian angguk.

Program desa budaya juga selain untuk melestarikan kesenian angguk juga sebagai wahana promosi untuk memperkenalkan angguk ke masyarakat luas. Dengan adanya desa budaya kelompok angguk jadi lebih sering pentas hingga lintas kabupaten bahkan ada yang sampai tingkat nasional.

Program berikutnya adalah Penampilan 100 penari angguk pada FKY 2014. Program ini bertujuan untuk mempopulerkan kesenian tari angguk sehingga masyarakat luas khususnya yang berada di Yogyakarta bisa mengetahui seperti apa kesenian angguk tersebut. Setelah ikut serta dalam FKY 2014 kesenian angguk menjadi lebih populer dan grup kesenian angguk menjadi lebih sering tampil.

Selain program desa budaya dan 100 penari angguk dalam FKY 2014, satu lagi program andalan pemerintah kabupaten Kulon Progo adalah mengemas tarian angguk menjadi gerakan senam. Senam angguk sendiri telah sukses diperlombakan hingga 2 seri dan jumlah antusiasme warga yang ikut cukup banyak bahkan dari kabupaten lain seperti Bantul dan Sleman juga tertarik untuk ikut bahkan senam angguk berhasil dipopulerkan hingga tingkat nasional. Selanjutnya senam angguk juga diperkenalkan kepada generasi muda melalui olah raga yang diadakan di sekolah. Dengan cara seperti itu masyarakat dengan sendirinya secara tidak langsung sudah menghafal gerakan angguk. Cara seperti ini bisa dikatakan cukup efektif untuk melestarikan kesenian tari angguk karena semakin banyak yang berminat menghafalkan gerakan tari angguk.

Jika dilihat dari kepuasan terhadap program maka dapat disimpulkan penggunaan dana keistimewaan urusan kebudayaan untuk kesenian tari angguk sudah efektif. Namun sangat disayangkan banyaknya dana keistimewaan yang diterima Kabupaten Kulon Progo tiap tahunnya terutama tahun 2015 lebih banyak dialokasikan untuk membangun bangunan fisik daripada sektor budaya tak benda semisal kesenian tari angguk. Padahal tari angguk adalah kesenian yang menjadi icon kabupaten Kulon Progo bahkan sudah diakui sampai tingkat nasional. Seharusnya pemerintah lebih memperhatikan sehingga bisa dikemas lebih baik sesuai dengan permintaan pasar agar bisa menjadi nilai lebih bagi pariwisata di Kulon Progo seperti halnya Sendra Tari Ramayana yang ada di kawasan Candi Prambanan. Jika dapat menjadi daya tarik bagi pariwisata Kulon Progo maka akan lebih banyak masyarakat yang menikmati berkah dari adanya dana keistimewaan tersebut.

4. Tingkat input dan output

Tingkat input (masukan) dan output (keluaran) sangat mempengaruhi tingkat keefektifitasan dari penggunaan dana keistimewaan urusan kebudayaan terhadap kesenian tari angguk. Dalam penelitian ini input dan output dibedakan menjadi dua yaitu input dan output dari segi dana dan input dan output dari program. Input dari besaran jumlah dana keistimewaan yang diterima Dinas Kebudayaan pada tahun anggaran 2014 sebesar 29 M sedangkan 2015 adalah 33 M. besaran dana tersebut untuk pembiayaan program pembangunan fisik dan non fisik. Jumlah output yang dikeluarkan Dinas Kebudayaan untuk program kesenian tari angguk pada tahun 2014 sebesar 20 juta untuk menggelar lomba senam angguk seri I yang merupakan bentuk promosi kesenian angguk dalam FKY. Kemudian pada tahun 2015 sebesar 26 juta untuk hadiah lomba senam angguk seri II yang juga diselenggarakan dalam FKY. Anggaran tersebut memang kecil jika kita melihat besaran Dana Keistimewaan urusan Kebudayaan yang diterima Kabupaten Kulon Progo secara keseluruhan karena dana tersebut hanya diperuntukkan untuk menggelar pertunjukkan tari angguk sebagai bentuk stimulus agar tari angguk semakin populer sehingga grup angguk tersebut mendapat banyak pesanan untuk pentas dan semakin banyak minat generasi muda yang tertarik mempelajarinya sehingga tari angguk tidak lekang tergerus oleh zaman.

Jika efektivitas input dan output dinilai dari besaran dana maka dana keistimewaan untuk urusan kebudayaan terbilang kurang efektif karena dengan penerimaan yang sangat besar yaitu 29 M pada tahun 2014 dan 25 M pada tahun 2015 namun yang dialokasikan untuk kesenian angguk hanya sedikit sekali sedangkan alokasi untuk pembangunan fisik begitu melimpah mencapai 11 M. Sudah seharusnya kesenian yang ada terutama kesenian tari angguk yang bisa dikatakan sebagai kesenian icon dari Kulon Progo mendapat perhatian lebih agar semakin banyak minat masyarakat untuk melestarikan dan suatu saat bisa menjadi daya tarik pariwisata di Kabupaten Kulon Progo.

Jadi untuk tingkat input dan output dapat menggambarkan bahwa pemanfaatan dana keistimewaan untuk kesenian tari angguk cukup efektif bahkan efisien. Dengan dana yang seminimal mungkin seluruh program yang diharapkan pemerintah yang bertujuan untuk mempopulerkan dan melestarikan kesenian tari angguk cukup sukses. Kesenian angguk juga sudah lebih sering tampil sehingga banyak pihak yang terlibat didalamnya ikut mendapat berkahnya.

5. Pencapaian tujuan menyeluruh

Indikator terakhir untuk mengukur tingkat efektivitas pada penelitian kali ini adalah pencapaian tujuan menyeluruh. Pencapaian tujuan menyeluruh adalah keseluruhan dari target program dan sasaran yang telah dicapai dan dipadukan dengan tingkat kepuasan dari seluruh pihak terkait tentang penggunaan dana keistimewaan urusan kebudayaan untuk program kesenian tari angguk.

Jika dilihat dari sudut pandang masyarakat pegiat kesenian angguk, mereka juga mengatakan dana keistimewaan sudah cukup efektif karena sudah ada perubahan yang mereka rasakan. Dengan adanya dana keistimewaan grup kesenian angguk jadi lebih sering tampil. Tujuan utama dari sering tampilnya grup kesenian angguk tersebut adalah peningkatan kesejahteraan bagi pegiat kesenian tari angguk. Selain itu dengan adanya dana keistimewaan mereka juga lebih mudah mendapat bantuan baik subsidi atau kompensasi ketika akan pentas bahkan bantuan berupa peralatan yang mereka butuhkan.

KESIMPULAN

Secara garis besar dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan dana keistimewaan urusan kebudayaan di Kulon Progo sudah cukup efektif terhadap kelompok kesenian tari angguk. Sejak adanya dana keistimewaan sudah ada perubahan yang mereka rasakan yaitu bentuk perhatian dari pemerintah dan mereka jadi lebih sering menggelar pentas. Dengan seringnya mereka menggelar pentas maka kesejahteraan mereka juga lumayan meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa adanya efektivitas dalam pemanfaatan dana keistimewaan urusan kebudayaan tahun 2014-2015 di Kabupaten Kulon Progo.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul, Aziz & Arnold, David D. 2003. *Desentralisasi Pemerintahan Pengalaman Negara-Negara Asia*. Bantul : Pondok Edukasi.
- Anshoriy Ch, Nasruddin. 2013. *Strategi Kebudayaan Titik Balik Kebangkitan Nasional*. Malang : UB Press
- Dantes, Nyoman. 2012. *Metode Penelitian*. Yogyakarta : ANDI.
- Dwiyanto, Agus, dkk. 2012. *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*. Yogyakarta : UGM Press.
- Haris, Syamsuddin. 2005. *Desentralisasi dan Otonomi Daerah*. Jakarta : LIPI Press
- Hendratno, Edie Toet. 2009. *Negara Kesatuan, Desentralisasi, Dan Federalisme*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Huda, Ni'matul. 2013. *Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Perdebatan Konstitusi dan Perundang-undangan Indonesia*. Bandung : Nusa Media..
- Huda, Ni'matul. 2014. *Desentralisasi Asimetris Dalam NKRI Kajian Terhadap Daerah Istimewa, Daerah Khusus dan Otonomi Khusus*. Bandung : Nusa Media
- Koentjaraningrat. 1980. *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*. Jakarta : Djambatan
- Kumorotomo, Wahyudi. 2008. *Desentralisasi Fiskal Politik Dan Perubahan Kebijakan 1974-2004*. Jakarta : Kencana.
- Moloeng, Lexy J. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Mutiarin, Dyah & Zaenuri, Arif. 2014. *Manajemen Birokrasi dan Kebijakan*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Ramses M., Andy. 2010. *Politik dan Pemerintahan Indonesia*. Jakarta : MIPI.
- Ruslan, Rosdi. 2003. *Metode Penelitian : Public Relation dan Komunikasi*. Jakarta : RajaGrafindo Persada.
- Sedyawati, Edi. 2006. *Budaya Indonesia Kajian Arkeologi, Seni, dan Sejarah*. Jakarta : RajaGrafindo Persada

- Setiadi, Elly M, dkk. 2006. *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group
- Sjafrizal. 2014. *Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Soetarto, Endriatmo. 2009. *Keistimewaan Yogyakarta : Yang Diingat dan Yang Dilupakan*. Jakara : Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
- Strauss, Anselm. 2003. *Dasar – Dasar Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Sukmadinata, Nana Syaodih. 2007. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung : Remaja Rosadakarya.
- Sukriono, Didik. 2010. *Pembaharuan Hukum Pemerintah Desa*. Malang : Setara Press.
- Sulasman & Gumilar, Setia. 2013. *Teori-teori Kebudayaan Dari Teori Hingga Aplikasi*. Bandung : Pustaka Setia
- Sutrisno. 2002. *Hubungan Antara Pengetahuan Membaca Pemahaman dan Penguasaan Kosakata dengan Keterampilan Menulis Wacana Deskripsi*. Surakarta : UNS.
- Syafrudin, Ateng. 2006. *Hakikat Otonomi dan Desentralisasi dalam Pembangunan Daerah*. Yogyakarta : Citra Media.

Tesis dan Skripsi

- Annafie, M. Khotmat. 2016. *Kelembagaan Otonomi Khusus (Otsus) Dalam Mempertahankan Nilai-Nilai Kebudayaan Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta*. Yogyakarta : Program Pascasarjana Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. *Tesis* tidak dipublikasikan.
- Pra, Sartika, Intaning. 2016. *Pengaturan dan Pengelolaan Keuangan Urusan Kebudayaan Sebagai Urusan Pemerintahan Konkuren dan Urusan Keistimewaan di Daerah Istimewa Yogyakarta*. Yogyakarta : Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada. *Tesis* tidak dipublikasikan.
- Pradana, Beda, Aruma. 2015. *Analisis Sistem Pengendalian Dana Keistimewaan Bidang Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta*. Yogyakarta : Ilmu Akuntansi Universitas Gadjah Mada. *Skripsi* tidak dipublikasikan.
- Sakir. 2015. *Analisis Kebijakan Anggaran Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014*. Yogyakarta : Program Pascasarjana Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. *Tesis* tidak dipublikasikan.

Sekarini, Darmastuti, Arum. 2016. *Analisis Kinerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta dalam Pengelolaan Dana Keistimewaan Tahun 2014*. Yogyakarta : Jurusan Administrasi Negara Universitas Gadjah Madha. *Skripsi* tidak dipublikasikan.

Peraturan

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. 2015. *Perdais Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan DIY*. Yogyakarta : Sekretariat Daerah. Yogyakarta.

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. 2012. *Perda Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya*. Yogyakarta : Sekretariat Daerah. Yogyakarta

Provinsi Dearah Istimewa Yogyakarta. 2005. *Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2005-2025*. Yogyakarta : Sekretariat Daerah. Yogyakarta

Republik Indonesia. 2012. *Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Kestimewaan Daerah Istimewa Yogakarta*. Jakarta : Sekretariat Negara.

Republik Indonesia. 2004. *Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah*. Jakata : Sekretariat Negara.

Republik Indonesia. 2004. *Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Pemerintah Daerah*. Jakarta : Sekretariat Negara.

Wawancara

Mursito, Joko. 2016. *Wawancara Efektivitas Pemanfaatan Dana Keistimewaan Urusan Kebudayaan*. Kantor Dinas Kebudayaan Kulon Progo, Jl. Sanun No.73 Wates.

Muryanti, Sri. 2016. *Wawancara Efektivitas Pemanfaatan Dana Keistimewaan Urusan Kebudayaan*. Sanggar Sri Panglaras, Pripih, Hargomulyo, Kokap.

Sujiman. 2016. *Wawancara Efektivitas Pemanfaatan Dana Keistimewaan Urusan Kebudayaan*. Sanggar Laras Sekar, Blimbing, Sentolo.

Website

<http://yogyakarta.bpk.go.id/2016/02/Dana-Keistimewaan-DIY> diakses tanggal 24 Oktober 2016

www.kulonprogokab.go.id/v21/ diakses tanggal 26 Oktober 2016

www.jdih.kemenkeu.go.id/2013/103/PMK-07-2013 diakses tanggal 25 Oktober 2016

<http://www.pikiran-rakyat.com/nasional/2015/01/11/311738/merebut-dana-keistimewaan-dengan-setor-ribuan-proposal> diakses tanggal 23 Oktober 2016

www.negerikuindonesia.com/2015/06/tari-angguk-tarian-tradisional/ diakses tanggal 24 Oktober 2016

<https://kulonprogokab.bps.go.id/Subjek/view/id/26#subjekViewTab3|accordion-daftar-subjek1> diakses tanggal 23 Oktober 2016

<http://jogja.tribunnews.com/2015/11/02/festival-lima-kampung-bakal-digelar-untuk-kritisi-pemanfaatan-danais> diakses tanggal 24 Oktober 2016

<https://nasional.tempco.co/read/news/2013/12/11/058536568/program-keistimewaan-yogyakarta-banyak-yang-ngawur> diakses tanggal 24 Oktober 2016

